

KEKUATAN FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA DAN KRISIS MONETER

Syafaruddin Alwi

Abstract

We must reconsider the statement that the fundamental of Indonesian Economy is strong, at least since currency crisis occurred. Theoretically, the crisis would not be occurred if fundamental of Indonesian Economy is strong. Apparently, the crisis has reacted the crippling level and far from being over. Is there anything wrong in economic policy, so we can not solve the problem ?

This paper analysis the economic fundamental and banking condition that affect vulnerability of economics. Some indicators, i.e: Monopolistic and oligopolistic market structure, weak currency control and decreasing of export, strengthen the assumption that the fundamental of Indonesian economy is fragile. The shallow of financial sector showed by many banks that is not operated based on a standardized sound banking, violation of rules, etc. Some policies needed to improve the situation are continuing strategic deregulation, deepening the financial sector and empowering human resources really.

KRISIS MONETER yang melanda beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia dan dua negara industri baru yaitu Hongkong dan Korea Selatan, diluar dugaan. Bahkan, IMF pun tidak percaya kalau krisis ini terjadi juga di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir ini, masyarakat termasuk pengusaha kita sudah larut dalam keyakinan bahwa secara fundamental perekonomian Indonesia kuat.

Di dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1997, yang dibacakan Presiden di depan sidang Paripurna DPR RI, dikemukakan bahwa kepercayaan terhadap kondisi fundamental ekonomi kita dan terhadap tradisi kebijakan makro yang berhati-hati yang selama ini dianut masih kuat.

Pernyataan ini menarik untuk dikaji jika dikaitkan dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin tajam sejak bulan September yang lalu. Pertanyaan yang mendasar adalah, benarkah secara fundamental ekonomi Indonesia kuat?. Jika memang kuat mengapa perekonomian kita tidak mampu mengatasi gejolak moneter terakhir ini ?. Apakah ada kebijakan yang salah terhadap perekonomian kita sehingga tidak

mampu mengatasi situasi krisis?. Mengapa kebijakan melepas *band* kurs dan pengetatan likuiditas tidak mampu menahan kemerosotan nilai rupiah ?. Semua pertanyaan seperti itu memerlukan jawaban sebagai upaya mengatasi krisis moneter saat ini dan mengantisipasi kemungkinan yang akan datang, sehingga "kepanikan ekonomi" tidak terjadi lagi. Memang, banyak terjadi perbedaan persepsi tentang faktor penyebabnya. Dua hal penting yang ingin diamati melalui tulisan ini yaitu, *struktur kekuatan ekonomi dan faktor perbankan*. Dalam kaitan ini yang penting dibahas adalah, bagaimana memperbaiki kerapuhan ekonomi yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut.

BEBERAPA INDIKATOR

Kuat atau tidaknya fundamental ekonomi secara teoritik dapat dilihat dari sejauh mana daya tahannya menghadapi tekanan gejolak ekonomi internasional. Sedangkan kerapuhan ekonomi dapat dilihat dari berbagai kondisi internal, seperti institusi keuangan terutama perbankan dan struktur perekonomian dan struktur pasar. Kekuatan atau kerapuhan perekonomian pada akhirnya

ditentukan antara lain oleh berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dan perilaku ekonomi para pelaku bisnis.

Sebelum krisis moneter terjadi, yaitu pada saat nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami kemerosotan yang tajam awal Agustus 1997, banyak pakar ekonomi mengatakan bahwa secara fundamental ekonomi Indonesia kuat dan akan mampu menghindari imbas krisis mata uang bath Thailand. Dengan jumlah cadangan devisa sebesar 20 \$ milyar yang dimiliki Bank Indonesia dinilai akan mampu menghadapi berbagai kemungkinan gejolak perekonomian internasional yang lebih luas.

Indikator lain yang menunjukkan secara fundamental ekonomi kita kuat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar rata-rata 7%-8% pertahun selama Repelita VI. Tingkat pertumbuhan ini relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang dianggap paling baik, yaitu rata-rata 7,6% pertahun. Tingkat inflasi semakin menurun dari 8,6% pada tahun 1995, menjadi 6,5% pada tahun 1996. Rasio defisit transaksi berjalan terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 3,5%, dapat dikendalikan dengan batas-batas yang dapat ditutup oleh cadangan devisa selama 5 atau 6 bulan membiayai impor. Sementara itu, dilihat dari struktur perekonomian, produk manufaktur yang dihasilkan jauh melebihi produk primer, terutama perannya dalam peningkatan nilai ekspor nasional. Kemampuan ekonomi kita menembus pasar internasional pun semakin meningkat. Karena anggapan ini pula sektor swasta berani melakukan pinjaman luar negeri, termasuk pinjaman jangka pendek dengan harapan sektor bisnis akan mampu meraup laba yang mampu mengembalikan pinjaman jangka pendek tersebut.

Sementara itu, di sisi makro bank-bank swasta yang dimiliki berbagai kelompok bisnis berlomba-lomba menarik dana dari nasabah dan menyalurkan dana tersebut bagi kepentingan bisnis kelompoknya. Karena yakin fundamental ekonomi Indonesia kuat, pengelola bank-bank swasta berani melakukan spekulasi-spekulasi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan

commercial paper, penyaluran kredit yang melebihi batas-batas kredit yang dibenarkan. Dengan demikian, kesehatan bank tidak lagi menjadi perhatian manajemen.

Tidak diduga sebelumnya, munculah gejolak moneter yang tidak saja melanda Indonesia, tetapi juga hampir semua negara anggota ASEAN dan negara industri baru seperti Korea Selatan. Hongkong yang tadinya dianggap kuat karena memiliki cadangan devisa sebesar \$ 60 milyar juga terkena dampaknya. Bagi Indonesia, ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai titik krisis sekitar Rp 3600 per \$ 1, pada bulan Oktober 1997, orang mulai menyadari bahwa perekonomian kita sebenarnya tidak sekuat penilaian selama ini.

Tekanan gejolak penurunan nilai tukar rupiah ini mendorong perekonomian kita berada dalam posisi kritis. Hutang *eksternal* yang dimiliki swasta, yang umumnya berjangka pendek, jumlahnya 1,5 kali dari nilai cadangan Bank Indonesia. Karena hutang ini kebanyakan akan jatuh tempo, jika tidak terjadi *roll over*, kebutuhan dollar akan meningkat dan nilai rupiah akan semakin terpuruk. Ternyata, ekonomi Indonesia sangat rapuh terhadap guncangan. Banyak diantara para pakar yang kurang sependapat jika dimensi makro seperti tingkat pertumbuhan, tingkat inflasi, cadangan devisa dsb dianggap sebagai indikator kekuatan fundamental perekonomian suatu negara. Kekuatan fundamental yang sesungguhnya harus dilihat pula dari *struktur pasar* dan *pelaku-pelakunya*.

Secara makro memang sukar untuk menyatakan bahwa secara fundamental ekonomi Indonesia kuat jika dilihat struktur pasar yang cenderung bersifat terkonsentrasi (*concentrated market*). Praktek monopoli dan oligopoli sudah lama diketahui sebagai salah satu penyebab rapuhnya perekonomian kita. Para pelaku ekonomi kuat cenderung membeli dollar dalam jumlah besar untuk tujuan-tujuan spekulatif dan melakukan ekspansi bisnis dengan dukungan pinjaman modal asing jangka pendek. Hutang jangka pendek ini tidak diikuti dengan tindakan

hedging sehingga mudah sekali kena hantaman fluktuasi kurs.

Berdasarkan data yang ada, dari \$ 6 milyar hutang swasta, hanya 30% yang dilindungi nilai (Warta Ekonomi, September 1997). Perusahaan-perusahaan yang paling terkena adalah perusahaan yang tidak berorientasi ekspor, sedangkan hutang jangka pendek dalam dollar akan segera jatuh tempo. Oleh sebab itu, ketika pemerintah mengambil beberapa kebijakan di bidang moneter untuk mengatasi penurunan nilai tukar rupiah melalui cara memperlebar *band* kurs, kemudian mengembangkannya dan pengetatan likuiditas, krisis tetap berlangsung, karena akar persoalan tidak tersentuh. Dennis Tray selaku Direktur Bank Dunia berpendapat bahwa krisis rupiah di Indonesia terjadi karena para investor tidak hanya melihat sebatas fundamental ekonomi makro yang, tetapi juga ekonomi mikro secara struktural. Struktur mikro inilah yang selama ini mengalami kelemahan terutama faktor efisiensi (Jurnal Pasar Modal Indonesia Agustus 1997).

Di lihat dari dimensi makro dan mikro cukup beralasan jika sebagian pakar meragukan bahwa secara fundamental ekonomi Indonesia kuat, bila diamati beberapa hal yang spesifik: (1) Oligopoli dan monopoli dalam perekonomian kita ternyata rentan terhadap gejala. Ekspansi bisnis yang dilakukan berbagai kelompok pengusaha cenderung spekulatif dan kurang memperhatikan asas perlindungan. Akibatnya, dalam melakukan pinjaman luar negeri, pinjaman tidak diikuti dengan lindung nilai (*hedging*), (2) *Currency control* kita lemah sehingga sulit mendeteksi berapa sebenarnya jumlah hutang swasta yang jatuh tempo. Padahal, kondisi seperti ini sangat rentan terhadap permainan para spekulan, (3) Melemahnya pertumbuhan ekspor dan berkembangnya proyek-proyek yang tidak langsung berkaitan dengan ekspor, (4) Tidak sehatnya sektor keuangan terutama perbankan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Bank-bank swasta umumnya lemah dalam manajemen operasinya. Hal ini tercermin dalam proses pemilihan nasabah, pemberian kredit dengan sistem kolateral yang mengandalkan nilai tanah,

bangunan dsb, yang cenderung menciptakan *boom* kredit dan kredit macet. Akibatnya, ekonomi menjadi *overheated* karena tingkat inflasi yang semakin meningkat. Pemerintah terpaksa melakukan *tight money policy*, yang pada akhirnya merugikan perkembangan usaha.

LIKUIDASI DAN MERGER

Faktor lain secara mikro, kelemahan terletak pada perilaku manajemen keuangan perbankan, terutama bank-bank swasta yang umumnya tidak sehat. Rapuhnya fundamental ekonomi ini terlihat antara lain dari banyaknya bank umum yang beroperasi tidak berbasis kesehatan keuangan bank yang *standardized*, kurang mentaati aturan main perbankan yang sehat, sehingga telah mendorong pemerintah melakukan likuidasi terhadap 16 bank swasta yang dianggap tidak sehat.

Berkembangnya jumlah bank yang beroperasi tidak lepas dari kebijakan paket Oktober 1988 yang melahirkan bank dengan rasio modal sendiri terhadap total asset yang rendah. Kinerja perbankan swasta yang berjumlah 239 buah sebelum terjadi gejala moneter yang parah ini umumnya sudah terlihat kurang baik dan tidak layak jalan. Sebagian besar bank yang tidak sehat dilihat dari Laporan Neraca dan Rugi Labanya, tidak mampu memenuhi ketentuan *Bank of International Settlement* berupa kewajiban memenuhi rasio kecukupan modal (CAR), tingkat *reserve requirement*, ketentuan LDR dan peningkatan jumlah KUK yang harus disalurkan. Merger dianggap sebagai jalan yang paling mungkin bagi bank-bank yang bersangkutan, jika tidak ingin terkena tindakan likuidasi oleh Pemerintah.

Merger yang dianjurkan oleh pemerintah terhadap bank-bank yang tidak terkena likuidasi dinilai tepat, ketimbang pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa pemerintah menjamin tidak ada lagi likuidasi terhadap bank-bank. Likuidasi terhadap setiap perusahaan, tidak terkecuali bank, adalah konsekuensi dari ketidakefisienan suatu lembaga bisnis dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, jaminan tidak akan terjadi lagi

likuidasi di kalangan perbankan, khususnya perbankan swasta, setelah likuidasi terhadap 16 bank terdahulu, tidak menjamin bank-bank yang tidak terkena likuidasi akan menjadi lebih baik, jika tidak segera melakukan reorganisasi finansial antara lain melalui proses merger dengan bank lain yang lebih kuat.

Dari 16 bank yang telah dilikuidasikan, hanya satu bank yang memiliki modal sendiri sebesar 60% dari total asset. Selebihnya, kebanyakan memiliki modal sendiri kurang dari 20%, bahkan satu bank memiliki rasio modal sendiri terhadap total assetnya nol persen. Walaupun dalam perspektif manajemen keuangan rasio ini belum bisa dianggap sebagai indikator buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan, tetapi bagi perbankan keadaan ini menimbulkan resiko tinggi. Bank yang bersangkutan, bisa terancam *illikuid* dan *insolvent* jika perekonomian mengalami guncangan seperti sekarang ini.

Pemerintah setelah melakukan kebijakan likuidasi perbankan swasta yang tidak sehat, menganjurkan agar bank-bank swasta yang lainnya yang tidak terkena melakukan merger dengan bank-bank umum lainnya yang sehat. Melalui merger, secara teoritik akan terjadi perbaikan struktur modal bank yang tadinya memiliki *equity ratio* yang rendah, menjadi lebih besar. Pola kerja yang tadinya kurang efisien karena beroperasi dengan kekuatan *under capacity*, menjadi lebih kuat karena bekerja dengan kapasitas dan akses *customer* yang lebih luas. Masalahnya adalah, merger pada hakikatnya tidak hanya bergabungnya kekuatan modal dua atau lebih lembaga bisnis dalam satu payung manajerial, melainkan menyangkut aspek-aspek non finansial yang seringkali menghambat pencapaian tujuan merger itu sendiri.

Problem dalam proses merger antara lain, *pertama*, ketidaksamaan nilai komitmen manajemen. *Kedua*, perbedaan kepentingan masing-masing *partner*. *Ketiga*, perbedaan antara prioritas

jangka pendek dengan jangka panjang dan *keempat*, ketidaksamaan obsesi tentang kultur organisasi yang akan dibentuk, dsb. Merger yang dilakukan diantara bank dalam manajemen group, mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut, mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi, merger diantara bank dalam koordinasi satu group bukan tidak memiliki kelemahan. Kelemahan itu misalnya, pola kerja praktek bank dalam bank bekerja bagi kepentingan group dan bukan bagi masyarakat luas seperti yang dilakukan beberapa bank.

Dari data yang ada dapat diamati, diantara bank yang terkena likuidasi, ternyata sebagian besar menempuh kebijakan menyalurkan dana kepada kelompoknya melebihi kapasitas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebesar 20%. Pola kerja dengan spekulasi tinggi, antara lain dalam bentuk bermain valas dan *commercial paper* yang dananya digunakan bagi kepentingan usaha sendiri. Pola seperti ini telah terjadi, sehingga bank yang bersangkutan mengalami kesukaran likuiditas. Kredit macet telah menjadi *phenomena* tersendiri bagi sistem moneter Indonesia, sebagaimana pada tabel 1.

Dari tabel tersebut dapat dilihat posisi kredit macet memang terjadi, tetapi mengalami penurunan pada bulan Juli 1997 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 1996. Kolektibilitas kredit yang lancar tetap besar, namun jumlah yang kurang lancar dan diragukan tetap juga terjadi, walaupun menurun. Oleh sebab itu, *merger* yang akan dilakukan oleh empat group Risyad Salim, Tirtamas, Ramako dan Bakrie) yang siap menggabungkan beberapa bank dalam group masing-masing, agar tidak melakukan praktek-praktek manajemen bank dan praktek bisnis yang mengulangi pola kerja seperti itu. Manajemen bank pasca *merger* harus mampu beroperasi dengan pola yang lebih efisien dan mempertahankan prinsip kepentingan masyarakat luas, dan bukan kepentingan bisnis kelompok atau keuntungan bank itu sendiri.

Tabel 1
Kolektibilitas Kredit Perbankan (%)

KOLEKTIBILITAS	JULI 1996	JULI 1997
Lancar	89,6	91,9
Kurang lancar	3,0	2,5
Diragukan	4,1	3,2
Macet	3,3	2,4
Jumlah	100,0	100,0

Sumber: *Jurnal Pasar Modal*, September 1997

Kita mengenal misi bank, apakah itu bank swasta atau bank pemerintah, sebagai agen pembangunan, yaitu mendistribusikan sumber daya langka dalam upaya mendorong perekonomian. Ini berarti, bank berada pada posisi strategis dalam pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat pada jalur-jalur ekonomi yang menjamin semua kepentingan masyarakat secara adil. Langkah merger ini dengan dukungan oleh PP No. 40, tentunya akan lebih cepat terealisasi karena BI memiliki kewenangan bertindak tanpa melalui RUPS bank yang bersangkutan, serta melakukan penggabungan seperti yang disyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas dan UU Perbankan sebelumnya. Dengan demikian secara hukum maupun politis, BI memiliki kekuatan untuk mengatasi manajemen bank yang tidak sehat. Tetapi, intervensi seperti ini, hendaknya tidak digunakan terus menerus karena akan menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif. Yang paling baik, *merger* dilakukan atas inisiatif bank itu sendiri berdasarkan pertimbangan bisnis yang tidak merugikan kepentingan *stakeholders*.

Setelah melakukan merger paling tidak dua hal yang perlu dilakukan dibidang finansial yaitu: menjaga rasio pencukupan modal yang aman dan menaati BMPK. Sudah tentu harus dengan

dukungan manajemen profesional, yang bekerja atas dasar visi dan misi baru yang disepakati. Pada akhirnya harus disadari, tindakan merger saja tidaklah cukup untuk memperbaiki kinerja keuangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada bank swasta. Merger diantara bank-bank bermasalah, apalagi dalam satu kelompok, cenderung hanya bersifat memperbaiki struktur modal dan posisi likuiditas yang belum menjamin perannya akan menjadi lebih baik.

Oleh sebab itu, hal yang penting pasca likuidasi bank bagi masyarakat adalah penegakkan *rule of play* di sektor perbankan dimana Pemerintah harus memperkuat pengawasan bank yang selama ini masih dianggap lemah, memperbaiki perangkat peraturan serta perundang-undangan yang dianggap masih membuka peluang terjadinya praktek-praktek perbankan yang tidak sesuai dengan misi bank, seperti undang-undang kredit dsb. Disamping itu, dalam menjalankan kebijakan moneter pemerintah seharusnya menghindari sikap tidak konsisten dalam mengambil kebijakan seperti yang telah terjadi, yaitu disatu pihak membuat kebijakan *floating exchange rate* yang bebas dengan membebaskan *band* intervensi, di pihak lain melakukan pengetatan likuiditas. Akibatnya, dunia usaha mengalami distorsi dan kepentingan

masyarakat luas terganggu. Di sini peran pengawasan DPR dalam jangka panjang terhadap pelaksanaan otoritas moneter sangat penting.

KEBIJAKAN UANG KETAT

Kebijakan moneter sejak tahun 1996 antara lain peningkatan giro wajib minimum bank (GWMB) menjadi 5% dan *spread* kurs intervensi dari 5% menjadi 8%, kebijakan melepas band kurs dan likuidasi perbankan terakhir ini. Apa implikasi yang diharapkan dari kebijakan ini?

Ekonomi politik dari kondisi ini adalah menjaga keseimbangan peredaran uang dengan dinamika perekonomian, khususnya pengendalian inflasi dalam negeri. Kebijakan Bank Indonesia kali ini perlu dicermati. Sebagai contoh *phenomena* akumulasi kredit macet yang sering diramalkan sampai saat ini disebabkan terjadinya *spread* tingkat bunga pinjaman yang semakin meningkat. Diduga timbulnya kredit macet ini disamping berkaitan dengan situasi perekonomian, juga disebabkan oleh kecuranghati-hatian bank-bank di Indonesia dalam memberikan kredit. Dalam upaya mengendalikan kredit dan sekaligus untuk menahan laju inflasi inilah nampaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan pengetatan likuiditas.

Kebijakan ini dianggap merugikan kepentingan perluasan investasi untuk ekspor, sehingga dituntut untuk melonggarkan kembali. Bantuan Singapura yang berjumlah \$ 5 milyar, menurut Murdiono (Bisnis Indonesia 1 Desember 1997) akan segera dicairkan guna mengatasi gejolak moneter. Tindakan ini, menyusul pencairan bantuan IMF diharapkan segera memulihkan kepercayaan masyarakat, termasuk investor asing terhadap nilai rupiah. Kondisi ini akan memutus permainan spekulasi dan meningkatkan kembali minat investor asing menanamkan dananya di Indonesia. Faktor yang harus dipertimbangkan atas tuntutan segera melonggarkan kebijakan ini adalah, implikasi pada perekonomian rakyat. Dampak yang paling terasa adalah menurunnya minat investasi, tetapi merosotnya daya beli rupiah yang dimiliki masyarakat tidak akan mendorong dinamika ekonomi.

Pada masa mendatang akan sulit bagi pengusaha dalam negeri untuk melakukan pinjaman luar negeri karena perubahan kurs tidak lagi dapat diramalkan dengan tepat. Semenjak dollar menjadi "komoditi" yang diperdagangkan antar negara selain sebagai alat pembayaran, globalisasi ekonomi, ekonomi dunia akan sangat rentan terhadap permainan para spekulasi. Sementara itu, utang luar negeri kita secara total telah semakin membengkak. Berdasarkan data Morgan Trust, pada tahun ini, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai US \$ 120,5 milyar, yang 28,5% diantaranya merupakan utang jangka pendek. Praktis, pemerintah akan menekan swasta untuk tidak melakukan pinjaman baru. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan bagi swasta untuk meningkatkan investasi dipenuhi dari sumber dalam negeri.

UPAYA

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian domestik saat ini secara teoritik dapat diperbaiki melalui reformasi ekonomi melalui kebijakan deregulasi lanjutan yang strategis menciptakan keseimbangan pasar dalam negeri serta memperkuat kemampuan lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbank terutama pasar modal. Untuk merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan dunia internasional, perlu dipahamijuga bagaimana berlakunya ekspansi kapitalis internasional di negara-negara berkembang agar perekonomian kita di masa yang akan datang secara fundamental memang kuat.

Jeffrey Sachs dari Harvard University dalam ceramahnya di Panglaim Memorial Lecture tahun 1996 mengemukakan bahwa dalam sejarah ekonomi dunia, sistem kapitalisme telah muncul dua kali yaitu pada akhir abad ke-19 pada akhir abad ke-20. Sistem kapitalisme global pertama mencapai puncak sekitar tahun 1910-an dan berantakan karena perang dunia ke I dan ke II. Kebangkitan sistem kapitalisme global kedua terjadi pada tahun 1980-an dengan dibangunnya

kembali ekonomi pasar global yang pernah terjadi 100 tahun yang lampau.

Menyimak pendapat Sachs ini, jika benar globalisasi sekarang ini merupakan derivasi dari pemikiran kapitalisme, maka kekuatan modal internasional akan merebak keseluruhan perekonomian, walaupun bukan lagi dalam bentuk ekspansi imperialisme melainkan dalam bentuk penguasaan pasar dan sumber daya ekonomi negara berkembang. Sistem kapitalis global telah menunjukkan bentuknya dengan mengikutsertakan semua kekuatan dunia menuju pengaturan perdagangan terbuka dan harmonisasi lembaga-lembaga ekonomi. Strategi kapitalis ini tidak lepas dari kepentingan negara maju untuk menjadikan negara berkembang sebagai pasar bagi barang-barang mereka.

Dalam kaitan ini, perilaku Sorros yang dituduh oleh Mahattir sebagai biang keladi krisis moneter di ASEAN diduga dalam kerangka kekuatan kapitalis melakukan spekulasi negara maju dan merugikan negara-negara berkembang. Menguatnya nilai dolar merupakan suatu bukti keuntungan negara maju yang nilai mata uangnya kuat.

Pada bagian lain ia juga menyatakan negara-negara berkembang yang terlibat proses globalisasi itu cenderung melakukan reformasi ekonomi dengan tujuan mengintegrasikan ekonomi nasional mereka dengan ekonomi dunia. Tindakan ini wajar dilakukan oleh negara-negara berkembang guna memanfaatkan peluang bisnis pasca *kebijakan proteksionis* yang telah menciptakan *trade barriers* bagi negara berkembang dalam hubungan bilateral dan multilateral. Indonesia pada tahun 1980-an juga mulai melakukan reformasi ekonomi, setidaknya dalam bentuk perubahan strategi perdagangan dari berorientasi ke dalam (*inward looking*), menjadi berorientasi keluar (*outward looking*), Indonesia juga berusaha merubah kekuatan ekonomi dari bertumpu pada produk migas menjadi bertumpu pada ekspor non-migas. Pemerintah juga melakukan serangkaian deregulasi di bidang industri dan perdagangan dalam upaya meningkatkan daya saing produk nasional dan mengefisienkan kegiatan

perekonomian. Semua itu mendorong dunia usaha kita untuk bergerak searah dengan irama pasar global dengan berbagai tantangan yang terjadi.

Dengan latar belakang ini, pertanyaan mendasar bagi dunia pengusaha nasional adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan pasar global itu sebagai peningkatan skala usaha dari skala regional dan nasional menjadi skala internasional. Dalam hal ini ada dua tantangan yang dihadapi, yaitu bagaimana agar di pasar domestik pengusaha kita tetap eksis walaupun terjadi penetrasi pasar produk asing dan di sisi lain bagaimana pengusaha kita mampu menerobos pasar internasional. Pertanyaan ini perlu diajukan berkaitan dengan perekonomian kita yang selalu mengalami defisit transaksi berjalan. Kalau selama ini ada anggapan bahwa defisit ini terjadi akibat kebijakan deregulasi yang tidak tepat, dorongan pemerintah yang kurang agresif dsb, mungkinkah salah satu penyebabnya adalah justru terletak pada lemahnya dunia usaha kita ?

Potret pengusaha nasional, baik di sektor kecil, menengah dan besar, terkesan belum siap memasuki kancah pasar global. Gejala-gejala mengenai itu dapat dirasakan melalui pengamatan terhadap perdagangan kita. Defisit transaksi berjalan dalam proses internasional dan semakin lambannya pertumbuhan ekspor merupakan salah satu indikator ketidakmampuan pengusaha nasional menembus pasar luar negeri. Para konglomerat lebih cenderung beroperasi di pasar domestik dari pada menembus pasar internasional. Akibatnya, struktur pasar menjadi tidak seimbang.

Merebaknya bisnis waralaba dan ritel raksasa yang mengincar pasar domestik (sebagai contoh), menunjukkan lemahnya antisipasi dan strategi pengembangan usaha lokal. Bisnis pada level "kelontong" tersapu oleh bisnis model Satu Atap (*One Stop Shopping*). Di sektor pertanian, komoditas seperti buah-buahan nilai ekspor hanya sepertiga dari nilai impor. Ini menunjukkan kelemahan dunia usaha kita yang cenderung mengabaikan pengembangan komoditas pertanian yang seharusnya dikembangkan sebagai bagian dari

produk andalan untuk ekspor. Terbaknya dunia usaha kita pada sifat "follower" dan bukan pada sifat inovator, menyebabkan "maceinya" diversifikasi produk yang seharusnya selalu dilakukan untuk memperoleh keuntungan kompetitif dalam perdagangan.

Samuelson, Ohlin dan Heckscher (SOH), mengembangkan teori Ricardo tentang pasar global bahwa, untuk memenangkan persaingan setiap negara harus memiliki *keunggulan komparatif* dan *kompetitif* atas produknya dalam pasar global. Model-model dasar tentang perdagangan dari SOH menurut Sachs (1996), menjelaskan bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi dalam suatu masyarakat menyukai proteksi perdagangan (baik pajak ekspor maupun impor). Proteksi pada era *World Trade Organization* (WTO) tidak mungkin lagi diandalkan. Oleh sebab itu, dalam proses reformasi ekonomi selanjutnya pemerintah harus menciptakan berbagai kebijakan deregulasi yang lebih luas dan mendasar, yang dapat menyentuh akar persoalan dan mampu mengatasi hambatan pasar dalam berbagai bentuk (termasuk birokrasi). Untuk menyentuh struktur pasar yang menciptakan distorsi perekonomian, diperlukan kebijakan yang berani untuk menghapus praktek-praktek monopoli dan oligopoli dalam perekonomian nasional. Deregulasi yang menghapus monopoli Bulog atas beberapa komoditas merupakan langkah maju, walaupun tidak tuntas karena distribusi beberapa komoditas lain, tetap harus melewati Bulog.

Di samping itu, harus disadari, bahwa upaya pemerintah dalam berbagai bentuk untuk memperkuat fundamental ekonomi tidak akan berhasil jika tidak dibantu oleh kalangan pengusaha itu sendiri. Perilaku bisnis para konglomerat termasuk perbankan yang ekspansionis dan bongkar pasang melalui akuisisi internal, merger dsb, perlu dikoreksi agar tidak meninggalkan kepentingan *stakeholders* dalam arti luas, yaitu pengusaha, pelanggan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Bagaimanapun, semua unit bisnis yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang dimiliki oleh pengusaha nasional, merupakan

asset nasional yang seharusnya bekerja bagi kepentingan masyarakat.

Suatu catatan bagi pengambil kebijakan bahwa semua langkah kebijakan ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, esensi pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan kekuatan fundamental ekonomi selanjutnya, harus bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Konsekuensi sikap ini adalah penggalan potensi rakyat diseluruh wilayah harus dilakukan secara merata melalui penyebaran investasi, terutama infrastruktur dan bantuan modal bagi ekonomi rakyat. Kemandirian ekonomi akan tercapai jika potensi ekonomi rakyat berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kontemporer.

Strategi dan konsep pemberdayaan rakyat (baca optimalisasi SDM) dalam menciptakan kekuatan mandiri tersebut, haruslah mengandung muatan langkah-langkah konkrit untuk menyakinkan masyarakat bagaimana mereka agar tetap eksis dalam kehidupan yang serba materialistis ini dengan tidak menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain. Pemahaman rakyat terhadap perilaku ekonomi yang berkeadilan adalah mutlak agar tercipta kedisiplinan sosial-ekonomi yang mengarah pada keyakinan diri sebagai dasar mencari jalan mengentaskan kemiskinan rakyat.

Kemiskinan dalam perspektif sosial ekonomi, menunjukkan ketidakmampuan masyarakat menggeser posisi kehidupannya, baik secara erikal (naiknya taraf kehidupan sosial) maupun secara horisontal (bertambahnya akses individu dalam lingkungan yang lebih luas) yang disebabkan ketidakmampuan ekonomi. Keadaan ini dalam jangka panjang akan menggoyahkan fundamental ekonomi. Manusia dalam pembangunan ekonomi adalah subyek (pelaku) yang sekaligus obyek (penerima hasil) pembangunan. Sebagai subyek ia harus dilibatkan dalam proses pembangunan itu. Pemberdayaan berarti upaya apa yang perlu dilakukan agar rakyat dapat secara langsung didorong ke posisi "terlibat" dalam proses tersebut. Harus di sadari bahwa kemampuan *competitiveness* perekonomian